

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR
12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
Febri Pratama
NPM: 1921020327**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR
12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air, sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunnya kapasitas sistem antara lain, banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik drainase, adanya bangunan lain diatas jaringan drainase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan untuk mengetahui pandangan Fiqh siyasah terhadap Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, Peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam mencapai kesesuaian tujuan sistem drainase pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dengan baik tetapi belum optimal. Pandangan Fiqh Siyasah mengenai Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase ialah dimana prinsip dari siyasah keadilan, amanah dan tanggung jawab. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung diketahui belum terealisasi secara adil. Karena pada faktanya banyak masyarakat yang masih merasakan dampak dari sistem drainase yang rusak dan tidak diperbaiki sehingga ketika musim hujan tiba menyebabkan tergenangnya air dan banjir.

Selain itu berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab juga belum sesuai dikarenakan dalam hal pelaporan tentang sistem drainase pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dengan baik tetapi belum optimal.

Kata Kunci : Sistem Drainase, Dinas Pekerjaan Umum, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febri Pratama
NPM : 1921020327
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM DRAINASE PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)”. adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2024
Penulis



Febri Pratama
NPM.1921020327



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)

**Nama : Febri Pratama
NPM : 1921020327
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002**

**Dr. Heryin Yoki Pradikta, M.H.
NIP. 198802182018011002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM DRAINASE PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh Febri Pratama NPM 1921020327, program studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 02 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” (Q.S Al-Ahzab : 72)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Rifa'ik dan Ibu Wiyah yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan tidak henti-hentinya selalu memotivasi, menasehati penulis dan memberikan dukungan yang begitu besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan saya dengan gelar sarjana yang akan diperoleh dari kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Adikku Arsy Bilqis Azizah yang selalu mendoakan dan menyemangatiku untuk menulis skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2019.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Febri Pratama dilahirkan pada tanggal 17 Februari 2001 di Bandar Lampung. Putra pertama dari dua bersaudara merupakan anak dari pasangan Bapak Rifa'ik dan Ibu Siti Hada Wiyah.

Sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi penulis menempuh pendidikan ditingkat dasar pada tahun 2006 di SDN 1 Sumur Putri Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMPN 17 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015, dilanjutkan di SMAN 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Strata 1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung



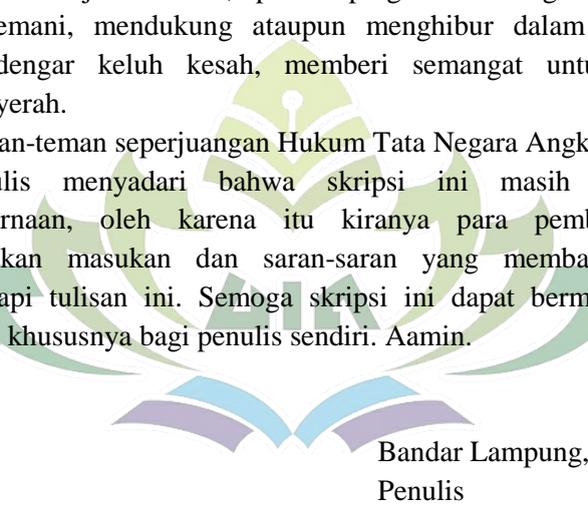
KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12/PRT/M/2014 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM DRAINASE PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung)”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman, semoga kita semua mendapat syafa‘at beliau di yaumul qiamah kelak. Aamiin ya robbal alamin

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar‘iyyah*), Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung, beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar‘iyyah*) Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu‘in, M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar‘iyyah*) Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya telah membimbing, mengarahkan, menasehati, memberikan support dan kemudahan dalam penulisan

- skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik dengan sangat baik selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan UIN Raden Intan Lampung.
 7. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah serta seluruh Staf Tata Usaha UIN Raden Intan Lampung.
 8. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
 9. Andini Risanti Saputri terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
 10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang membangun guna melengkapi tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Amin.



Bandar Lampung, 2024
Penulis

Febri Pratama
NPM. 192102037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	23
3. Prinsip Fiqh Siyasah.....	24
4. Sumber Fiqh Siyasah.....	24
B. Siyasah Tanfidziyah.....	27
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	27
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	29
C. Drainase.....	31
1. Sistem Drainase Perkotaan.....	34
2. Permasalahan Drainase di Wilayah Perkotaan.....	35
3. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Drainase.....	36

4. Pemeliharaan drainase	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum	39
2. Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum	40
3. Bidang Usaha / Kegiatan Utama	41
4. Lokasi Instansi.....	45
5. Struktur Organisasi.....	46
B. Penyajian Data Penelitian	47
BAB IV ANALISA DATA	65
A. Impementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	65
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Yang Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung	76
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum	45
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian.....	87
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Riset	88
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	89
Lampiran 4. Dokumentasi	90
Lampiran 5. Blanko Bimbingan Skripsi	95
Lampiran 6. Surat Keterangan.....	97
Lampiran 7. Keterangan Turnitin.....	98
Lampiran 8. Pedoman Wawancara.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian tentang skripsi judul yang hendak diajukan. Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Judul dalam penelitian ini adalah “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perspektif Fiqh Siyasa^h”. untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.¹
2. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.²
3. Sistem Drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya saluran drainase terdiri dari saluran penerima, saluran pengumpul, saluran pembawa, saluran induk, dan badan air penerima. Di sepanjang sistem drainase sering dijumpai

¹ Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014). 854

² Ela Susilawati, ‘Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan’ (UIN Sultan Syarif Kasim, 2019). 6

bangunan lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air, pelimpah, pintu-pintu air, bangunan terjun kolam tando, dan stasiun pompa.³

4. Fiqh Siyasa Fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan sipembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴ Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, AlQur'an dan sunnah).⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi di atas adalah upaya untuk mengkaji secara ilmiah mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum dalam implementasi penyelenggaraan sistem drainase. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum melakukan peran tersebut dan sekaligus menjawab keritikan yang dilayangkan oleh masyarakat kepada pemerintah tentang peran tugasnya dengan baik.

B. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat di Kecamatan Panjang menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan jasa/industry dan juga perdagangan yang selanjutnya menjadi kawasan terbangun. Maka diperlukan proses perencanaan tata ruang yang matang, sehingga pertumbuhan dan perkembangan pembangunan menjadi lebih terarah dan dapat dikendalikan dengan baik. Tanah adalah tempat

³ Arszandi Pratama, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015). 4

⁴ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). 21

⁵ Ibid., 22

manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, sekarang, maupun untuk waktu yang akan datang.⁶

Hukum Tata Ruang adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang proses perencanaan, peruntukan pemanfaatan, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.⁷ Penataan mulai akan dapat mengalami kesulitan dalam mengembalikan seperti kondisi asalnya, sebab berdampak pada struktur ruang atau kawasan tertentu. pembangunan pada dasarnya bertumpu dan berorientasi di seputar kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁸

Masalah yang muncul ke permukaan tentang penataan tata ruang di Indonesia yang sedang dihadapi permasalahan kondisi keterbatasan ruang wilayah, sementara kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat, maka diperlukan pendekatan pengelolaan ruang wilayah nasional secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan, yang kemudian kita kenal dengan pendekatan penataan ruang.⁹

Dalam perencanaan pembangunan, salah satu komponen dasarnya adalah drainase sebagai fasilitas dasar yang dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat. pengadaan drainase berfungsi diantara untuk mengalirkan air hujan, estetika kota, pengairan atau sumber air. Peran drainase yang vital bagi sebuah kota adalah sebagai sarana pengairan air hujan.¹⁰

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Drainase

⁶ Muchsin and Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 46

⁷ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2014). 80

⁸ Pratama. Pratama. 4

⁹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang* (Jakarta: Grafindo Persada, 2018). 20

¹⁰ Adhitia Listiawati, 'Implementasi Peraturan Daerah Kot Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 210-2030', 2016. 23

juga dapat diartikan untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah.¹¹

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebuah instansi pemerintah yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara pengadaan proyek-proyek pekerjaan umum. Proyek-proyek tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bidang pekerjaan yang meliputi bidang: bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.¹²

Selain itu, penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategi, penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan strategis dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, teknologi dan industri, pengembangan pelaksanaan pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana sarana air limbah, jasa konstruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah dengan kebijakan umum daerah.¹³

¹¹ Supirin, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013). 7

¹² Idalamat, 'Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung', <https://idalamat.com/alamat/39897/dinas-pekerjaan-umum-pu-bandar-lampung>, 2020.

¹³ Nova Wulandari, 'Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl. Saleh Abbas Pasar Bawah)', *JOM FISIP*, 7.2 (2020), 5–24.

Begitupun dalam Islam merupakan agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan ada aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar Negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”. (Q.S Al-Baqarah:172)

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwanya demi tercapainya Negara yang makmur dan sejahtera dibutuhkan pemerintahan yang berlaku amanah dan jujur.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dan memerlukan suatu manajemen yang baik di dalam perencanaan, pengarahannya, dan pengendalian yang tepat. Dan harus di dukung pula dengan pencatatan data-data yang baik pula, karena laporan suatu data dapat menentukan langkah-langkah yang diambil nantinya bagi kelangsungan aktivitas pemerintahan. Sistem Informasi pengolahan data dikatan sangat bermanfaat apabila didalamnya telah menggambarkan suatu sistem yang diterapkan dalam menjaga kekayaan dan catatan pemerintahan, mengecek ketelitian dan kehandalan data serta mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.¹⁴

¹⁴ Kuspiyanti Wulandari, Joko Pramono, and Joko Suranto, 'Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Surakarta', 2022 <<http://repository.uin-suska.ac.id/58236/>>.

Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat satuan kerja yang salah satu tugasnya pembina dan pelaksana urusan pekerjaan umum maka termasuk di dalamnya Sistem Drainase Perkotaan yang merupakan salah satu infrastruktur untuk membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak terjadi banjir. Banjir merupakan kata yang sangat populer di Indonesia, khususnya pada saat musim hujan, mengingat hampir di seluruh kota di Indonesia terkena banjir. Peristiwa ini hampir setiap tahun berulang, namun permasalahan ini sampai saat ini masih belum terselesaikan, bahkan cenderung makin meningkat.¹⁵

Sistem jaringan drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya kapasitas saluran drainase sudah diperitungkan untuk dapat menampung debit air, sehingga kawasan yang dimaksud tidak mengalami genangan atau banjir. Jika kapasitas saluran drainase menurun dikarenakan oleh berbagai sebab maka debit yang normal sekalipun tidak akan bisa ditampung oleh sistem yang ada. Sedangkan sebab menurunnya kapasitas sistem antara lain, banyak terdapat endapan sedimen, terjadi kerusakan fisik drainase, adanya bangunan lain diatas jaringan drainase.¹⁶

Hasil dari survey lapangan drainase daerah Kecamatan Panjang terdapat banyak sampah dan menjadi pemicu terjadinya sumbatan mengakibatkan banjir. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Kebersihan, disebutkan bahwa retribusi kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan pemerintahan.¹⁷ Sarana dan Prasarana yang ada belum dapat mengelola kebersihan sampah. Sarana dan prasarana yang paling

¹⁵ Idalamat, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung

¹⁶ Dimitri Fairizi, 'Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang', *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 3.1 (2015).

¹⁷ Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Kebersihan

dibutuhkan adalah mobil pengangkut sampah, selain mobil pengangkut sampah, sarana lainnya adalah bak sampah yang ada dipinggir jalan, untuk saat ini bak sampah yang seharusnya ada di sepanjang jalan di Kecamatan Panjang belum tersedia, sehingga sampah masyarakat menumpuk di sepanjang jalan. Karena Kecamatan Panjang sangat luas, hal ini mempengaruhi pelaksanaan retribusi kebersihan juga ini menyulitkan dalam melakukan pengawasan Jarak tempat pembuangan sampah juga mempengaruhi pelaksanaan retribusi kebersihan di Kecamatan Panjang, karena jarak TPS yang berjauhan membuat masyarakat malas untuk membuang sampah pada lokasi yang telah ditentukan, sehingga masyarakat lebih sering menumpuk sampah di pinggir-pinggir jalan meskipun disana sudah dipasang pengumuman larangan membuang sampah.¹⁸

Banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan jatuh kedalam saluran drainase sehingga saluran drainase yang penuh dengan sampah mengakibatkan aliran air tidak mengalir dan menyebabkan bau tidak sedap dan mengurangi nilai estetika. Selain itu air run off yang berada dipinggir jalan dikarenakan drainase yang tidak memadai. Selain dari drainase yang tidak memadai yang menjadi faktor penyebab banjir di daerah Kecamatan Panjang yaitu kurangnya lahan terbuka untuk resapan air karena lahan yang ada sudah disemenisasi.¹⁹

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung harus bisa mengoptimalkan drainase yang sudah ada, juga Dinas Pekerjaan Umum harus bekerjasama dengan stake holder lain seperti tata kota guna mengatasi banjir ini. Sehingga Kecamatan Panjang tidak lagi menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Berdasarkan Peraturan Menteri No 12 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) :²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Bapak RT Masyarakat Kecamatan Panjang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak RT Masyarakat Kecamatan Panjang

²⁰ Peraturan Menteri No 12 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
2. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Namun faktanya, di Kecamatan Panjang masih sering terjadi banjir atau genangan-genangan air yang terdapat di jalanan, seperti di Kelurahan Pidada di jalan-jalan ini sering terdapat genangan air apabila terjadi hujan yang diakibatkan oleh saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan juga drain inlet yang ada di pinggir jalan terlalu kecil dan terkadang tersumbat pasir atau tanah. Selain itu banyak bangunan yang didirikan oleh masyarakat di pinggir jalan di sepanjang kecamatan panjang yang seringkali menutup saluran drainase akibatnya air tidak dapat mengalir dengan lancar dan saluran drainase menjadi bermasalah.

Ada juga kendalanya pada bangunan rumah yang dibangun oleh warga, pondasi yang dibangun terlalu maju ke depan saluran air sehingga menyebabkan saluran air itu rusak atau tersumbat maka apabila hujan sedikit saja air yang seharusnya mengalir dalam saluran dengan lancar tapi malah meluber kemana-mana dan akhirnya menyebabkan genangan atau bahkan banjir. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai peran untuk menangani masalah drainase yang ada di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perspektif Fiqh Siyash.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memfokuskan masalah kepada implementasi

Peraturan Menteri No 12 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan.

2. Sub Fokus

Batasan masalah dalam penelitian dalam skripsi ini adalah Peraturan Menteri No 12 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Drainase Perkotaan pasal 2 ayat 2:

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Penelitian ini difokuskan di Kelurahan Piadada Kecamatan Panjang, Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh siyasah terhadap Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplementasikan Peraturan

Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan peran Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraann sistem drainase.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Siyash dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Wulandari (2020) dengan judul penelitian “Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl. Saleh Abbas Pasar Bawah)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sistem drainase di Pasar Bawah Jl Saleh Abbas tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Pengelolaan Sistem Drainase belum berjalan optimal, hal ini disebabkan belum jelasnya bidang yang bertanggung jawab menangani masalah drainase ini dan belum adanya program kegiatan khusus sehingga proses dalam kegiatan yang dilakukan tidak dapat diselesaikan.²¹

²¹ Wulandari.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nova Wulandari berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Nova Wulandari memfokuskan pada pengelolaan sistem drainase. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan umum dalam mengimplementasikan penyelenggaraan sistem drainase serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelenggaraan sistem drainase yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kuspiyanti Wulandari Dkk (2022) dengan judul penelitian “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengendalian Banjir di Kota Surakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengendalian Banjir di Kota Surakarta dengan menggunakan teori menurut Mudrajad Kuncoro yang terdiri dari 3 indikator yaitu koordinator, fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengendalian banjir di Surakarta berperan sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator. Namun masih ada kendala untuk mencapai tujuan pengendalian banjir yaitu kurang cepatnya tindakan atau penanganan keluhan dan kurang optimalnya dalam penyampain informasi perbaikan fasilitas dan penggunaan media keluhan, dan kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya peraturan, izin, dan retrebusi terhadap penutupan saluran atas sungai maupun drainase, sehingga masih banyak masyarakat menutup saluran tanpa izin.²²

Perbedaan penelitian Kuspiyanti Wulandari dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Kuspiyanti memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan Umum Dan tata ruang dalam penanggulangan banjir. Sedangkan penelitian yang

²² Kuspiyanti Wulandari, Joko Pramono, and Joko Suranto, ‘Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Surakarta’, 2022 <<http://repository.uin-suska.ac.id/58236/>>

penulis lakukan adalah memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan umum dalam mengimplementasikan penyelenggaraan sistem drainase serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjadikan dinas pekerjaan umum sebagai objek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Hermawan Dkk (2019) dengan judul penelitian “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu”. Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir melalui sebuah Program Pengendalian banjir Dinas (PUPR). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda berperan dalam Program pengendalian banjir dari hasil penelitian ini telah dapat di ketahui bahwa program Pengendalian banjir oleh Dinas PUPR telah berjalan dan terlaksana. Dari beberapa program pengendalian banjir hanya saja ada beberapa faktor sehingga belum bisa berjalan dengan efektif. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda masih terkendala keterkendalaan itu dari beberapa faktor anggaran yang ada setiap tahunnya serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk meminimalisir perencanaan lingkungan yang berdampak pada terjadinya banjir.²³

Perbedaan penelitian Candra Hermawan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Kuspiyanti memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan Umum Dan tata ruang dalam penanggulangan banjir. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan umum dalam mengimplementasikan penyelenggaraan sistem drainase serta faktor pendukung dan faktor

²³ Candra Hermawan, Masjaya, and Burhanudin, ‘Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu’, *EJournal Ilmu Pemerintah*, 7.1 (2019), 465–78.

penghambatnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjadikan dinas pekerjaan umum sebagai objek penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Regyna Zefanya Amelia Palimbongan, Jeffry S. F. Sumarauw dan Tiny Mananoma (2020) dengan judul penelitian “Analisis Sistem Drainase Di Jalan Parigi 7 Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado. Kompleks Jaga V Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Jalan Parigi 7, Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang memiliki permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan saluran drainase dalam menampung debit air yang ada. Kurangnya kemampuan saluran drainase dalam menampung debit air mengakibatkan genangan di beberapa titik di Jalan Parigi 7, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan. Untuk itu perlu dilakukan penataan kembali jaringan sistem drainase guna untuk mengurangi genangan dan segala akibat lainnya. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui secara tepat penyebab terjadinya genangan. Analisis Hidrologi dilakukan untuk mendapatkan debit rencana (Qrencana). Perkiraan hujan rencana dilakukan dengan analisis frekuensi terhadap data curah hujan dengan kala ulang 10 tahun menggunakan metode distribusi Log-Pearson III. Debit rencana dihitung menggunakan Metode Rasional.²⁴

Perbedaan penelitian Regyna Zefanya Amelia Palimbongan, Jeffry S. F. Sumarauw dan Tiny Mananoma dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Regyna Dkk memfokuskan pada analisa sistem drainase. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan umum dalam mengimplementasikan penyelenggaraan sistem drainase serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai sistem drainase.

²⁴ Regyna Zefanya and others, ‘Analisis Sistem Drainase Di Jalan Parigi 7 Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado’, *Tekno*, 17.74 (2020), 29–37.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Muthya Angraini Dkk (2022) dengan judul penelitian “Implementasi Sistem Drainase Perkotaan Di Kawasan Perumnas Iii Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur.” Komplek Perumnas III merupakan salah satu kawasan pemukiman yang berada di dalam wilayah Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur. Permasalahan utama kawasan permukiman Perumnas III khususnya RW 09 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur yaitu rentan terhadap banjir saat musim penghujan. Kondisi ini akan semakin parah saat terjadi air pasang tinggi. Saluran drainase tidak lagi mampu menampung curah hujan yang tinggi. Efisiensi saluran yang ada telah berkurang. Sedimentasi dan sampah yang menyumbat menyebabkan aliran air tidak dapat mengalir secara optimal dan lancar. Aktifitas sehari-hari warga terganggu dan lingkungan menjadi tidak sehat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka kawasan permukiman memerlukan suatu pengetahuan dan tindakan nyata dalam pelaksanaan pembuatan drainase yang baik. Tujuan pelaksanaan PKM kali ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan contoh pemodelan drainase untuk bisa diaplikasikan di kawasan perumahan tersebut. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah metode ceramah/diskusi,dan metode demonstrasi. Hasil dari kegiatan PKM ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan warga setelah dilakukan sosialisasi tentang sistem drainase perkotaan, Operasi-Pemeliharaan (OP) saluran drainase dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Kegiatan PKM ini juga akan menghasilkan contoh pemodelan drainase untuk bisa diaplikasikan di kawasan permukiman Perumnas III khususnya RW 09.²⁵

Perbedaan penelitian Ika Muthya Angraini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Ika memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan Di Kawasan Perumnas Iii Kelurahan

²⁵ Angraini Ika Muthya and others, ‘Implementasi Sistem Drainase Perkotaan Di Kawasan Perumnas Iii Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur’, *Jurnal Pengabdian Kep*, 5 (2022), 22–27.

Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada peran Dinas Pekerjaan umum dalam mengimplementasikan penyelenggaraan sistem drainase serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menjadikan dinas pekerjaan umum sebagai objek penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.²⁶ Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan, karena data-data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Dalam penelitian ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini.²⁷ Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 44

²⁷ Anak Agung Putu Agung, *Metode Penelitian* (Malang: UB Press, 2012).

dengan apa adanya tentang bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplementasikan penyelenggaraan sistem drainase dilihat dari peraturan menteri dan Fiqh Siyash.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).²⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan staff Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁹ Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, buku-buku, Jurnal, dan literature-literatur lain yang mendukung.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staff Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

²⁸ Sugiyono, Op.Chit, 45

²⁹ Ibid.,

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2014). 154

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik sampel yang dipakai yaitu teknik purposive sampel, yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan adanya tujuan tertentu.³¹

Penarikan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan memulai mencari data dengan jumlah yang kecil (dimulai dari informan kunci) kemudian meluas kepada informan yang diarahkan dari informan kunci yang akhirnya jumlah informan akan bertambah banyak seperti bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci yaitu Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berjumlah 1 orang yang melaluinya pula akan diarahkan kepada orang-orang yang akan menjadi informan-informan berikutnya misalnya staff umum Dinas Pekerjaan Umum 4 orang dan masyarakat 5 orang. Validitas data dalam teknik *snowball* ini tidak ditentukan dari banyaknya jumlah informan melainkan kualitas data yang diperoleh, oleh karena itu peneliti dapat menghentikan wawancara dengan informan ketika peneliti yakin bahwa data yang didapat telah valid.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³² Adapun

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : PT.Adi Ofset,1991).

³² Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016). 34

yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait yaitu staf Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik dan menimba kepribadian individu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, Koran, majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³³ Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:³⁴

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.³⁵ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

³³ Ibid., 37

³⁴ A. M. Miles, M. B. and Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book or New Methods. 2nd Ed* (USA: Sage Publication, 2004). 35

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.103.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.³⁶

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum.³⁷ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peran, faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2015),h.181.

³⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.182.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang pengertian teori peranan, fiqh siyasah, pengertian sistem drainase.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan penelitian berisi tentang pelaksanaan peran, faktor penghambat dan faktor pendukung penyelenggaraan sistem drainase perspektif Fiqh Siyasah.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata Fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahufiqhan*. Secara bahasa pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”.³⁸ Imam al Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh' tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata *fuqaha* diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan ilmu tentang hokum yang tidak pasti (*zhanni*).

Fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan sipembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³⁹

Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, AlQur'an dan sunnah).⁴⁰

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara “sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara” tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 2

³⁹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* 21

⁴⁰ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* 22

Secara etimologis (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk masdar (asal) dari *sasa*, yaitu *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.⁴¹ Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan atas semua sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁴²

Siyasah secara terminologis dalam lisan Al Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:

- a. Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.
- b. Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.
- c. Abdurrahman, menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.
- d. Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya. Dalam hubungannya dengan

⁴¹ Ibid., 24

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...3

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tidak kenal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bias diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dan fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴³

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fiqh siyasah atas beberapa bagian:

- a. Imam al-Mawardi, ahli fiqh mazhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah mengatakan bahwasannya ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), politik moneter (*siyasah maliyah*), politik peradilan (*siyasah qadla'iyah*), politik peperangan (*siyasah harbiyah*) dan politik administrasi (*siyasah idariyah*).
- b. Sementara Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul *assiyasah al-Syar'iyah di asilah al-Ra'iyah* membagi *fiqh siyasah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.
- c. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang dan peperangan.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*.....4

3. Prinsip *Fiqh Siyasah*

Secara Konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah Negara dalam prespektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*Ummah*), hukum islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*Khilafah*).

Prinsip-prinsip Negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk dalam fiqh.

Para pakar *fiqh siyasah* berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al Qanuniah* (1994: 211-233) mensistematisasikan Prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut:

- a. Persamaan yang komplit
- b. Keadilan yang merata
- c. Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas
- d. Persaudaraan
- e. Persatuan
- f. Gotong royong (saling membantu)
- g. Membasmi pelanggaran hukum
- h. Menyebarkan sifat-sifat utama
- i. Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugrahkan Tuhan

4. Sumber *Fiqh Siyasah*

Setelah mengetahui ruang lingkup fiqh siyasah di atas maka yang terpenting untuk kita ketahui adalah sumber atau dasar pokok fiqh siyasah.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan didunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit didalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya, mulai dari ahlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara emplisit didalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya.

Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasa di antaranya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۙ ١٤

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”. (Q.S Yunus 10: 14)

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embannya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasa. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai—nilai terkait siyasa yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada firman Allah swt.

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nissa 4:9)

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi, namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rosulnya, maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin, jika benar-benar mengaku beriman, maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.

Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanNya.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S Al-Araaf 7:96)

Dalam ayat ini Allah SWT. Memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal

penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah di berikan oleh Allah bisa terealisasi. Nilai-nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai—nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (Q.S An-Nissa 4:58)

B. Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikn tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁴

⁴⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999). 23

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁵

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁶

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

⁴⁵ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011). 56

⁴⁶ *Ibid.*, 12

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁷

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁸

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). 7

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 28

⁴⁹ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 12.

- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁰

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵¹

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah

⁵⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁵²

C. Drainase

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma –norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.⁵³

Otonomi daerah adalah hak, Wewenang, dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Berdasarkan undang-undang tersebut daerah yang melaksanakan otonomi daerah disebut dengan daerah otonom. Daerah otonom tersebut memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana seluruh pengaturan dan pengurusan tersebut harus sejalan dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Banjir adalah salah satu masalah utama tidak hanya sering terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Peristiwa banjir khususnya di musim hujan setiap tahun berulang, namun permasalahan ini sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik,

⁵² Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, 5

⁵³ Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, 23.

⁵⁴ Bernades H Sitohang, 'Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase): 1400', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5.4 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.008.01.06>>.

bahkan cenderung makin meningkat, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah perubahan fungsi tutup lahan yang signifikan dan buruknya penataan sistem jaringan drainase. Besarnya volume air hujan tidak sebanding lagi dengan daya tampung sistem drainase yang telah direncanakan. Sebagai solusi atas hal tersebut, sering dilakukan kegiatan normalisasi dan rehabilitasi dengan menambah volume saluran drainase serta pembersihan saluran akibat sedimen dan sampah. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan normalisasi tersebut dinilai tidak efektif dan sulit dilakukan dikarenakan kondisi seperti permukaan tanah yang rendah dan datar.⁵⁵

Bencana banjir selalu terjadi setiap tahun di beberapa kota besar di Indonesia. Banjir terutama terjadi pada bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS), meskipun di beberapa hulu DAS juga mengalami kondisi yang serupa. Banjir terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah perubahan penggunaan lahan di hulu DAS, intensitas curah hujan yang tinggi, adanya erosi dan sedimentasi di alur sungai, menurunnya kapasitas sungai akibat adanya pemukiman penduduk dan pembuangan sampah ke sungai, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan perencanaan sistem drainase yang kurang tepat. Permasalahan banjir yang terjadi telah menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan kota.⁵⁶

Perkotaan merupakan pusat kegiatan manusia, pusat produsen, pusat perdagangan, sekaligus pusat konsumen. Di wilayah perkotaan tinggal banyak manusia sehingga terdapat banyak fasilitas umum, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Saluran drainase di wilayah perkotaan menerima tidak hanya air hujan, tetapi juga air buangan (limbah) rumah tangga, juga limbah pabrik. Hujan di wilayah perkotaan dapat terkontaminasi ketika air memasuki, melintasi atau berada di lingkungan perkotaan. Kontaminasi yang terjadi bisa berasal dari udara, bangunan atau

⁵⁵ Ibrahim Djamaluddin, Sumarni Hamid Aly, and Irwan Ridwan Rahim, 'Pengelolaan Drainase Kota Sebagai Upaya Mitigasi Banjir Kota Makassar', *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 3.2 (2022), 9 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.008.01.06>>.

⁵⁶ Pranoto, *Kaitan Perilaku Dan Aktivitas Masyarakat Terhadap Banjir Serta Upaya Pencegahannya* (Semarang: LPB Publishing, 2003). 7

permukaan tanah, dan limbah domestik yang mengalir bersama air hujan. Setelah melalui wilayah perkotaan, air hujan dengan atau tanpa limbah domestik, membawa polutan ke badan air dan sungai.⁵⁷

Sumber penyebab utama permasalahan drainase adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Urbanisasi yang terjadi di sebagian kota besar di Indonesia, menambah beban berat di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk yang meningkat, diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan seperti perumahan, sarana transportasi, air bersih, prasarana pendidikan. Di samping itu peningkatan penduduk selalu juga diikuti dengan peningkatan limbah, baik limbah cair maupun padat (sampah). Kebutuhan akan lahan untuk permukiman maupun kegiatan perekonomian akan semakin meningkat sehingga terjadi perubahan tataguna lahan yang mengakibatkan peningkatan aliran permukaan dan debit puncak banjir. Besar kecil aliran permukaan sangat ditentukan oleh pola penggunaan lahan, yang diekspresikan dalam koefisien pengaliran yang bervariasi antara 0,10 (hutan datar) sampai 0,95 (perkerasan jalan). Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan fungsi lahan dari hutan menjadi perkerasan jalan bisa meningkatkan debit puncak banjir sampai 9,5 kali, dan hal ini mengakibatkan prasarana drainase yang ada menjadi tidak mampu menampung debit yang meningkat tersebut.⁵⁸

Drainase (drainage) yang berasal dari kata kerja “to drain” yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air, adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem–sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan intensitas hujan yang tinggi atau akibat durasi hujan yang lama. Secara umum drainase didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan

⁵⁷ Henny Pratiwi Adi and Slamet Imam Wahyudi, *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder* (Semarang: EF Press Digimedia, 2017). 2

⁵⁸ *Ibid.*, 3

yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaat tertentu.⁵⁹

Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Secara fungsional, sulit dipisahkan secara jelas antara sistem drainase dan sistem pengendalian banjir. Genangan yang terjadi sehubungan dengan aliran di saluran drainase akibat hujan lokal terhambat masuk ke saluran induk dan atau ke sungai, sebelumnya juga disebut banjir. Membedakan genangan akibat luapan sungai dengan genangan akibat hujan lokal yang kurang lancar mengalir ke sungai, seringkali di lapangan mengalami kesulitan.⁶⁰

1. Sistem Drainase Perkotaan

Secara umum sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters).⁶¹ Bentuk saluran drainase terbagi menjadi beberapa yaitu:

a. Bentuk Segi Empat

Umumnya digunakan pada daerah yang lahannya tidak terlalu lebar dan harga lahannya mahal, umumnya digunakan untuk saluran yang relatif besar dan sedang. Berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air

⁵⁹ I Wayan Muliawan, 'Dampak Genangan Air Hujan Terhadap Kondisi Jalan Antasura Di Kecamatan Denpasar Timur', *Jurnal PADURAKSA*, 8.1 (2019), 45 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50>>.

⁶⁰ Ahmad Syapawi, '—Studi Permasalahan Drainase Jalan (Saluran Samping) Dilokasi Jalan Demang Lebar Daun Sepanjang ± 3900 M (Lingkar Sma Negeri 10 S.D Simpang Polda)', *PILAR Jurnal Teknik Sipil*, 9.2 (2013), 145 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50406>>.

⁶¹ Eri Prawati and Agus Karsa Juansyah, 'Analisis Kapasitas Saluran Drainase Terhadap Banjir Pada Ruas Jalan Rapol – Gang Lambau Kota Metro – Lampung', *TAPAK*, 11.1 (2021), 60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50>>.

hujan dengan debit yang besar. Sifat alirannya terus menerus dengan fluktuasi yang kecil.

b. Bentuk Trapesium

Umumnya digunakan pada daerah yang masih mempunyai lahan cukup luas, dan harga lahan murah, umumnya digunakan untuk saluran yang relatif besar, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar. Sifat alirannya terus menerus dengan fluktuasi yang kecil, bentuk saluran ini dapat digunakan pada daerah yang masih cukup tersedia lahan.

2. Permasalahan Drainase di Wilayah Perkotaan

Perkotaan merupakan pusat kegiatan manusia, pusat produsen, pusat perdagangan, sekaligus pusat konsumen. Wilayah perkotaan tinggal banyak manusia sehingga terdapat banyak fasilitas umum, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Saluran drainase di wilayah perkotaan menerima tidak hanya air hujan, tetapi juga air buangan (limbah) rumah tangga, dan mungkin juga limbah pabrik. Hujan yang jatuh di wilayah perkotaan kemungkinan besar terkontaminasi ketika air itu memasuki dan melintasi atau berada di lingkungan perkotaan. Sumber kontaminasi berasal dari udara (asap, debu, uap, gas), bangunan dan atau permukaan tanah, dan limbah domestik yang mengalir bersama air hujan. Setelah melewati lingkungan perkotaan, air hujan dengan atau tanpa limbah domestik, membawa pencemaran ke badan air.

Sumber penyebab utama permasalahan drainase adalah peningkatan / pertumbuhan jumlah penduduk. Urbanisasi yang terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia akhir-akhir ini menambah beban daerah perkotaan menjadi lebih berat.

Manajemen sampah yang kurang baik memberi kontribusi percepatan pendangkalan/penyempitan saluran dan sungai, sehingga kapasitas/kemampuan mengalirkan air dari sungai dan saluran drainase menjadi berkurang. Perubahan fungsi lahan dari hutan (kawasan terbuka) menjadi daerah

terbangun (kawasan perdagangan, permukiman, jalan dan lain-lain) juga mengakibatkan peningkatan erosi. Material yang tererosi, terbawa serta ke dalam saluran dan sungai sehingga turut mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan.

Perkembangan kota harus diikuti dengan evaluasi dan atau perbaikan sistem secara menyeluruh, tidak hanya pada lokasi pengembangan, tetapi juga daerah sekitar yang terpengaruh. Sebagai contoh, pengembangan suatu kawasan permukiman di daerah hulu suatu sistem drainase, maka perencanaan drainase-nya tidak hanya dilakukan pada kawasan permukiman tersebut, tetapi sistem drainase di hilir juga harus dievaluasi dan atau diredesain jika diperlukan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka instansi atau pengembang yang terlibat harus mampu menjamin (secara teknis) bahwa air dari kawasan yang dikembangkan tidak mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah pengembangan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah pengembang harus menyediakan di kawasan pengembangan tersebut, resapan-resapan buatan seperti sumur resapan, kolam resapan, kolam tandon sementara, embung dan sebagainya.⁶²

3. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Drainase

Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase perkotaan merupakan bagian dari sistem drainase perkotaan. Sistem yang baik, jika tidak dibarengi dengan operasi dan pemeliharaan yang baik, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan cara mengurangi atau menghilangkan genangan air atau banjir yang sangat merugikan masyarakat.⁶³

⁶² Pratiwi Adi and Imam Wahyudi, *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder*, 5.

⁶³ Andi Nahriza, Nurhikmah Alam, and Basyar Bustan, 'Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi Dan Pemeliharaan', *JACEE*, 11.1 (2021), 44 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2672>>.

Pemeliharaan sistem drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan untuk menjaga tetap berfungsinya sistem drainase yang ada jenis pemeliharaan meliputi :⁶⁴

- a. Pemeliharaan rutin adalah pekerjaan yang selalu dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu misalnya setiap hari, minggu, atau bulan.
- b. Pemeliharaan berkala merupakan pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu tertentu, misalnya setahun sekali atau setahun dua kali.
- c. Pemeliharaan khusus dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.
- d. Rehabilitasi, dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak berfungsi.

4. Pemeliharaan drainase

Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari sistem produksi dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki.⁶⁵

Jenis–Jenis Pemeliharaan Jenis–jenis Pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /PRT/M/2014 Paragraf 3 Pasal 22 meliputi: Pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan mechanical electrical. Pemeliharaan berkala Pemeliharaan berkala meliputi kegiatan: penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bal kontrol/gorong–

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ H Sitohang, —*Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase)*...,l 1402

gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi ,dan pemeliharaan mechanical electrical.⁶⁶

Rehabilitasi Rehabilitasi meliputi kegiatan: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).



⁶⁶ Ibid.,

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Henny Pratiwi, and Slamet Imam Wahyudi, *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder* (Semarang: EF Press Digimedia, 2017)
- Anak Agung Putu Agung, *Metode Penelitian* (Malang: UB Press, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014)
- Djamaluddin, Ibrahim, Sumarni Hamid Aly, and Irwan Ridwan Rahim, 'Pengelolaan Drainase Kota Sebagai Upaya Mitigasi Banjir Kota Makassar', *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 3.2 (2022), 9
<<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.008.01.06>>
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Fairizi, Dimitri, 'Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang', *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 3.1 (2015)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang* (Jakarta: Grafindo Persada, 2018)
- Hermawan, Candra, Masjaya, and Burhanudin, 'Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu', *EJournal Ilmu Pemerintah*, 7.1 (2019), 465–78
- Idalamat, 'Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung', <https://Idalamat.Com/Alamat/39897/Dinas-Pekerjaan-Umum-Pu-Bandar-Lampung>, 2020
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik*

Islam (Jakarta: Prenada Media, 2014)

- Listiawati, Adhithia, 'Implementasi Peraturan Daerah Kot Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 210-2030', 2016
- Miles, M. B. and Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: A Source Book or New Methods. 2nd Ed* (USA: Sage Publication, 2004)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2014)
- Muchsin, and Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Muliawan, I Wayan, 'Dampak Genangan Air Hujan Terhadap Kondisi Jalan Antasura Di Kecamatan Denpasar Timur', *Jurnal PADURAKSA*, 8.1 (2019), 45
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50>>
- Muthya, Anggraini Ika, Zainal Wahyu, Muji Listyo Widodo, and Temmy Hastian, 'Implementasi Sistem Drainase Perkotaan Di Kawasan Perumnas Iii Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur', *Jurnal Pengabdian Kep*, 5 (2022), 22–27
- Nahrisa, Andi, Nurhikmah Alam, and Basyar Bustan, 'Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi Dan Pemeliharaan', *JACEE*, 11.1 (2021), 44
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2672>>
- Pradikta, Hervin Yoki, and Rindy Mustika, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah', *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2022), 9
- Pranoto, *Kaitan Perilaku Dan Aktivitas Masyarakat Terhadap Banjir Serta Upaya Pencegahannya* (Semarang: LPB Publishing, 2003)
- Pratama, Arszandi, *Menata Kota Melalui Rencana Detai Tata Ruang* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015)
- Prawati, Eri, and Agus Karsa Juansyah, 'Analisis Kapasitas Saluran Drainase Terhadap Banjir Pada Ruas Jalan Rapol – Gang Lambau Kota Metro – Lampung', *TAPAK*, 11.1 (2021), 60

<<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50>>

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999)

Pulungan, Sayuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Sitohang, Bernades H, 'Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase): 1400', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5.4 (2017)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.008.01.06>>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016)

Supirin, *Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013)

Susilawati, Ela, 'Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan' (UIN Sultan Syarif Kasim, 2019)

Syapawi, Ahmad, '—Studi Permasalahan Drainase Jalan (Saluran Samping) Dilokasi Jalan Demang Lebar Daun Sepanjang \pm 3900 M (Lingkaran Sma Negeri 10 S.D Simpang Polda)', *PILAR Jurnal Teknik Sipil*, 9.2 (2013), 145
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50406>>

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Kencana, 2014)

Wulandari, Kuspiyanti, Joko Pramono, and Joko Suranto, 'Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Surakarta', 2022
<<http://repository.uin-suska.ac.id/58236/>>

Wulandari, Nova, 'Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus Drainase Jl. Saleh Abbas Pasar Bawah)', *JOM FISIP*, 7.2 (2020), 5–24

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011)

Zefanya, Regyna, Amelia Palimbongan, Jeffry S F Sumarauw, Tiny Mananoma, and A Latar Belakang, 'Analisis Sistem Drainase Di Jalan Parigi 7 Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado', *Tekno*, 17.74 (2020), 29–37

